



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DELIA STIATNA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 716249

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.096.100.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 71 m ² /60 m ² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m ² /78 m ² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000		
3. Tanah Seluas 1.425 m ² di KAB / KOTA BANJARNEGARA, Rp. 441.750.000		
4. Tanah Seluas 497 m ² di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 273.350.000		
5. Tanah Seluas 420 m ² di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 231.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	90.000.000
1. MOTOR, YAMAHA BY8 A/T X-TRADE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA BISON Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	94.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	25.325.194



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.305.925.194
III. HUTANG	Rp.	353.004.541
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.952.920.653

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.